

COMMUNITY POLICING POLRESTA SURAKARTA

Chatia Hastasari, Alvika Hening Perwita, Poundra Swasty Ratu

Maharani Serikit

Universitas Sahid Surakarta

chatiahastasari@yahoo.com

alvika.hp@gmail.com

poundra_swasty@yahoo.com

Abstrak

Pasca keluar dari ABRI, Polri melakukan reformasi yang meliputi perubahan struktural, organisasional dan kultural. Selama bergabung dalam ABRI, citra Polri di masyarakat dianggap sama dengan citra TNI yang militer. Kini, setelah keluar dari ABRI, Polri mengusung konsep *Community Policing* (Perpolisian Masyarakat), dengan salah satu program yang bernama 'Satu Polri Satu Desa'. Mekanisme pelaksanaan program 'Satu Polri Satu Desa' di Polresta Surakarta diawali dengan kegiatan *silaturahmi* di masing-masing Kelurahan. *Silaturahmi* menjadi pilihan utama, karena kegiatan ini merupakan bentuk komunikasi interpersonal khas Indonesia yang sifatnya persuasif sekaligus sebagai penyampai pesan kearifan lokal untuk dapat mengajak masyarakat berpartisipasi didalamnya. Selanjutnya, personil yang ditugaskan dalam program ini berkewajiban memberikan pembinaan-pembinaan pada masyarakat setempat. Pembinaan dilakukan ditingkat Kelurahan melalui FKPM (Forum Komunikasi Perpolisian Masyarakat) ataupun pembinaan ditingkat sekolah-sekolah yang berada di daerah tersebut. Tujuan adanya pembinaan dan diskusi ini adalah agar tercipta suatu hubungan antara masyarakat dengan Polri.

Kajian ini nantinya membahas strategi pencitraan yang dilakukan oleh Polresta Surakarta dalam upaya untuk meningkatkan citra Polri yang tegas dan humanis melalui program 'Satu Polri Satu Desa' dengan pola strategi yang menekankan pada kegiatan *silaturahmi* untuk menjalin kedekatan hubungan Polisi dengan masyarakat.

Keywords: Community Policing, Strategi Pencitraan, Silaturahmi.

Pendahuluan

Pasca keluar dari ABRI, Polri memiliki paradigma baru yang meliputi perubahan struktural, organisasional dan kultural. Selama bergabung dengan ABRI, citra Polri di masyarakat dianggap sama dengan citra TNI yang militer. Pada HUT Polri yang ke-60, Mantan Kapolri Jenderal Polisi Sutanto mengungkapkan bahwa dalam kerangka konsep *Community Policing* (Perpolisian Masyarakat), sosok Polri mengarah pada profesionalitas yang meliputi ketegasan, humanis dan modern dengan pola strategi yang menekankan pada kedekatan hubungan Polisi dengan masyarakat (*Security*, Edisi Juli 2006: 3). Banyak kebijakan-kebijakan strategis dalam *Community Policing* yang kemudian dikembangkan dan dijalankan ke seluruh jajaran, termasuk Polresta Surakarta yang saat ini tengah menjalankan program ‘Satu Polri Satu Desa’.

Dengan melihat pada karakteristik budaya di Kota Surakarta, mekanisme pelaksanaan program ‘Satu Polri Satu Desa’ di Polresta Surakarta diawali dengan kegiatan *silaturrahim* di masing-masing kelurahan dalam bentuk kunjungan/tatap muka kepada tokoh-tokoh masyarakat baik formal maupun informal. *Silaturrahim* dapat memperkuat hubungan untuk mengokohkan rasa kasih sayang antar sesama sehingga melahirkan bentuk persaudaraan yang kokoh atau hubungan harmonis (Marzawi, 2009 : 91-92). Disamping itu, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk atau model kearifan lokal bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih terus dilestarikan. Saini dalam Suryadi (2010) menyatakan bahwa kearifan lokal merupakan sikap, pandangan, dan kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya. *Silaturrahim* mampu memberikan kepada komunitas itu daya tahan dan daya tumbuh di dalam wilayah di mana komunitas itu berada (Suryadi dkk, 2010 : 601).

Selanjutnya, personil yang ditugaskan dalam program ini berkewajiban memberikan pembinaan-pembinaan pada masyarakat setempat. Pembinaan dilakukan ditingkat Kelurahan melalui FKPM (Forum Komunikasi Perpolisian Masyarakat) ataupun pembinaan ditingkat sekolah-sekolah yang berada di daerah tersebut. Tujuan

adanya pembinaan dan diskusi ini adalah agar tercipta suatu hubungan antara masyarakat dengan Polri.

Sebagai Satuan Kepolisian yang memiliki wilayah hukum dijalur persilangan strategis antara Jawa Timur, Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta serta Kota Semarang, Polresta Surakarta telah cukup baik dalam mengembangkan program ini hingga tingkat RW. Bahkan pada tahun 2011 lalu Polresta Surakarta berhasil memperoleh peringkat pertama dalam penilaian program 'Satu Polri Satu Desa' yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah. Menurut Kompol Zaenal Arifin, Kasubag Bimas, Polresta Surakarta sudah menerapkan program tersebut sejak tahun 2005 dan mampu diaplikasikan ke seluruh kelurahan yang ada di Surakarta. Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji dengan menghubungkan strategi pencitraan yang dilakukan oleh Polresta Surakarta dalam upaya untuk meningkatkan citra Polri yang tegas dan humanis melalui program 'Satu Polri Satu Desa'. Strategi pencitraan tersebut tentunya menekankan pada kegiatan *silaturrahim* untuk menjalin kedekatan hubungan Polisi dengan masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Menurut Kriyantono (2008:67), jenis riset deskripsi bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Riset ini untuk menggambarkan realitas yang sedang terjadi tanpa menjelaskan hubungan antar variabel. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya (Kriyantono, 2008:56). Yang diutamakan dalam riset ini adalah persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data.

Deskriptif kualitatif tidak begitu memperhatikan populasi dan sampling. Sumber data yang digunakan di sini tidak sebagai

sumber data yang mewakili populasinya tetapi lebih cenderung mewakili informasinya. Pengertian ini sejajar dengan jenis teknik sampling yang dikenal sebagai purposive sampling, dengan kecenderungan peneliti untuk memilih informannya berdasarkan posisi dengan akses tertentu yang dianggap memiliki informasi yang berkaitan dengan permasalahannya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap (Sutopo, 2006:64).

Data atau informasi yang dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian ini sebagian besar berupa data kualitatif. Informasi tersebut akan digali dari beragam sumber data, dan jenis sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Informan
- b. Tempat dan peristiwa atau aktivitas apa saja yang dilakukan berkaitan dengan perencanaan strategi pencitraan Polresta Surakarta.
- c. Arsip atau dokumen resmi sebagai data pendukung yang dapat memperjelas data utama.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara percakapan informal. Wawancara percakapan informal (*the informal conversational interview*) menunjuk pada kecenderungan sifat sangat terbuka dan sangat longgar (tidak terstruktur) sehingga wawancara memang benar-benar mirip dengan percakapan. (Pawito, 2007: 132-133).

Tinjauan Pustaka

Komunikasi dan *Silaturahmi*

Istilah komunikasi atau *communication* berasal dari kata latin *communicatio*, dan bersumber dari kata *communis*, yang berarti *sama*. *Sama* di sini maksudnya adalah *sama makna* (Effendy, 2002:9). Komunikasi dapat terus berlangsung apabila pihak yang terlibat di dalamnya dapat memaknai percakapan tersebut. Pengertian dan

konsep komunikasi mengalami banyak perkembangan seiring dengan kondisi budaya masyarakat. West dan Turner (2008: 5) mendefinisikan komunikasi sebagai proses sosial di mana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka. Dengan demikian, komunikasi merupakan suatu proses yang juga melibatkan unsur-unsur budaya yang terdapat dalam lingkungan mereka.

Menurut Marzawi berkomunikasi bisa dalam bentuk *silaturahmi*. Karenanya, *silaturahmi* menjadi salah satu bentuk komunikasi baik secara langsung (*face to face communication*) maupun tidak langsung (Marzawi, 2009 : 87). *Silaturahmi* menurut Marzawi berasal dari dua kata; “shilah” yang berarti sambung/menyambung dan hubungan atau memperkuat serta ‘ar-rahm” yang berarti kasih sayang atau cinta kasih. Kedua kata tersebut bermaksud melakukan dan memperkuat hubungan untuk mengokohkan rasa kasih sayang antar sesama sehingga melahirkan bentuk persaudaraan yang kokoh atau hubungan harmonis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa “silaturahmi” itu diartikan menyambung tali kasih (Marzawi, 2009 : 91-92).

Salah satu pola *silaturahmi* yang dikutip oleh Marzawi dalam Ibrahim dkk (1937 : 34) adalah saling berkunjung, di mana hal ini dapat dilakukan dengan cara datang langsung dan memperkenalkan diri kepada mereka yang belum kenal sebelumnya, dan kepada mereka yang telah kenal sebelumnya bahkan telah akrab, maka akan terjalin hubungan yang semakin baik, terjalin keakraban dan saling pengertian (Marzawi, 2009 : 95). Konsep *silaturahmi* tersebut telah diadopsi dan diterima secara luas oleh masyarakat di Indonesia, khususnya di Jawa. Hal ini sangat dimungkinkan oleh keberadaan kearifan lokal penunjang yang tidak bertentangan, dan bahkan memiliki persamaan, yang memungkinkannya untuk berasimilasi.

Sambang, Sambung, Srawung

Kearifan lokal tidak terbangun dalam semalam, melainkan terwujud melalui proses cipta, rasa, dan karsa oleh sekelompok

manusia yang mendiami suatu wilayah. Masyarakat Jawa memiliki tradisi filosofis tinggi yang tercermin oleh produk-produk kearifan lokal yang dimilikinya. Salah satu konsep yang cukup populer dalam tradisi Jawa adalah konsep *sambang*, *sambung*, dan *srawung*. Kata-kata ini berasal dari Bahasa Sansekerta, di mana *sambang* berarti jenguk atau kunjung (Zoetmulder, 2006). *Sambang* merupakan konsep yang secara masif diterapkan dalam kehidupan keseharian masyarakat Jawa sebagai suatu pola perilaku.

Bentuk perilaku *Sambang* dapat ditemui di berbagai lapisan masyarakat Jawa. Apabila salah seorang di suatu desa jatuh sakit, maka orang-orang akan berupaya untuk menjenguk orang tersebut sebagai upaya berempati terhadap penderitaan sesama. Ini dianggap sebagai hal yang lumrah, dan diterima oleh masyarakat. Bentuk *sambang* yang dilakukan pun sangat bervariasi. Ketika seseorang di desa akan mengadakan selamatan atau syukuran, maka warga desa akan berdatangan untuk membantu keberlangsungan proses selamatan tersebut. Poudra Swasty R.M.S (2009) mengemukakan bahwa meskipun disebut dengan sebutan yang berbeda-beda (contoh: *rewang*, *melabot*) namun kegiatan tersebut memiliki esensi yang serupa. Hal ini senada dengan pendapat Geertz (1960) bahwa masyarakat Jawa meyakini konsep "*wedi kuwalat*" dan senantiasa berupaya untuk menyelaraskan diri dengan lingkungan dan masyarakat sekitarnya.

Sambung dan *Srawung* adalah implikasi yang diharapkan muncul setelah *sambang* dilakukan. Dengan adanya *sambang*, diharapkan masyarakat menjadi terhubung, dan dapat bergaul dengan baik satu dengan yang lain. Konsep Islami yang menjadi salah satu sumber munculnya *silaturrahim* adalah *muamalat* atau hubungan horizontal yang baik antara sesama manusia. Maka dengan masuknya konsep *silaturrahim* bersamaan dengan masuknya Islam, konsep tersebut tidak mengalami penolakan, dan bahkan diadopsi dan berasimilasi dengan kearifan lokal yang telah ada sebelumnya.

Community Policing

Tuntutan reformasi di tubuh Polri, harus berdiri dan berfungsi sebagai sebuah organ sipil yang tidak lagi seperti sebelum reformasi. Perubahan itu dengan kata lain, mengembalikan Polri ke masyarakat sipil dalam konteks historisnya yang sempat mengadopsi struktur dan kultur militer. Karena itu, konsep sosiologis ideal program *Community Policing* merupakan alternatif utama yang kemudian dijalankan oleh Polri (*Security*, 2006 : 72).

Lebih detail, Kabag Bimas Polresta Surakarta Kompol Zaenal Arifin menyatakan :

Dalam *Community Policing*, polisi bersama masyarakat berpartisipasi aktif mengamankan lingkungan serta menjaga ketertiban sipil. Masyarakat bukan lagi sebagai objek yang harus dilindungi oleh polisi, tapi terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penanggulangan kejahatan.¹

Dengan demikian yang dikedepankan dalam *Community Policing* adalah perubahan paradigma model polisi. Yaitu, perubahan dari masyarakat sebagai objek, menjadi masyarakat sebagai mitra. Sehingga Polri lebih dapat berperan sebagai mitra masyarakat dan menjadi fasilitator dalam mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat.

Meski bukan satu-satunya model yang bisa dipakai untuk membangun wajah Polri, *Community Policing* merupakan model kerja yang mampu mencairkan kekakuan hubungan antara polisi dan publik. Model ini juga mampu menyinergikan upaya kerja sama membangun sistem, mekanisme, strategi, hingga komunikasi dua arah yang hidup dalam mewujudkan keamanan lingkungan dan ketertiban sipil. *Community Policing* juga merupakan wahana mengeksplorasi aspirasi, inisiatif dukungan, kemitraan polisi dan masyarakat, guna meningkatkan citra positif Polri di masyarakat.

¹ Hasil wawancara dengan Kabag Bimas Polresta Surakarta, 18 Januari 2012.

Strategi Pencitraan

J. L. Thompson (1995) mendefinisikan strategi sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir, hasil akhir menyangkut tujuan dan sasaran organisasi. (Oliver, 2007:2). Sedangkan Schroder (2008:300) menyebut strategi pencitraan sebagai strategi target *image* (citra yang diinginkan).

Mintzberg menawarkan lima kegunaan dari kata strategi, yaitu:

- a. Sebuah rencana – suatu arah tindakan yang diinginkan secara sadar;
- b. Sebuah cara – suatu manuver spesifik yang dimaksudkan untuk mengecoh lawan atau kompetitor;
- c. Sebuah pola – dalam suatu rangkaian tindakan;
- d. Sebuah posisi – suatu cara menempatkan organisasi dalam sebuah lingkungan;
- e. Sebuah perspektif – suatu cara yang terintegrasi dalam memandang dunia. (Oliver, 2007:2).

Usaha membangun pencitraan merupakan proses yang panjang, karenanya untuk membangun pencitraan Polri membutuhkan dukungan serta kerja sama semua pihak terutama hubungan dengan masyarakat.

Hasil Dan Pembahasan

Mekanisme pelaksanaan program 'Satu Polri Satu Desa' ini diawali dengan melakukan *silaturahmi* di masing-masing Kelurahan dalam bentuk kunjungan/ tatap muka kepada tokoh-tokoh masyarakat baik formal maupun informal. *Silaturahmi* yang dilakukan Polri ditujukan kepada kelompok-kelompok atau warga masyarakat tertentu, baik pada peristiwa kemasyarakatan maupun di sekolah-sekolah.

Kegiatan *silaturrahim* yang di dalam filosofi Jawa dikenal dengan nama *sambang* ini terbukti cukup efektif karena sifatnya yang timbal balik, tatap muka, dan *purposive*. Dari kegiatan ini, nantinya akan didapat sejumlah data yang berhubungan dengan karakteristik masyarakat setempat. Pelaksanaan kegiatan *silaturrahim* di Polresta Surakarta, dilakukan berdasarkan jadwal kegiatan yang telah dibuat, serta telah disetujui oleh Kasubag Bimas Polresta Surakarta.

Masing-masing personil terpilih yang ditugaskan dalam program 'Satu Polri Satu Desa' ini terlebih dahulu menjalani pelatihan BBKTM (Bhabinkamtibmas) selama 2 minggu di Banyubiru dan Purwokerto. Tujuan dari pelatihan ini adalah agar para personil memiliki keahlian yang berkaitan dengan pembinaan masyarakat dan mampu melakukan hubungan dengan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kapabilitas jangka panjang dalam pelaksanaan program 'Satu Polri Satu Desa'.

Kematangan berpikir personil yang bertugas dalam program ini sangat dipertimbangkan karena tujuan dari program ini adalah menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat ditingkat Kelurahan dengan kekeluargaan. Personil terpilih yang ditugaskan dalam program ini harus memiliki kriteria tertentu dalam kepangkatan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Aiptu Mulyono, sebagai berikut :

Personil yang bertugas dalam program ini harus sudah berpangkat Bripta. Pertimbangannya *ya* karena yang dihadapi adalah permasalahan masyarakat yang cukup kompleks, sehingga dibutuhkan kebijaksanaan dan pengalaman khusus dari personil yang bertugas. *Kalo* yang ditugaskan personil dengan pangkat minimal Briptu masih kurang pengalaman *mbak*.²

Berbagai permasalahan yang berhasil diatasi secara kekeluargaan dengan bukti hitam diatas putih dari kedua belah pihak yang bertikai kemudian dilaporkan secara berkala setiap satu bulan sekali oleh para personil yang bertugas. Untuk jenis kasus yang berat

² Hasil wawancara dengan personil Bimas, 19 Januari 2012.

atau tidak bisa terpecahkan dengan jalur kekeluargaan, akan diteruskan ke unit Reserse untuk ditindak lanjuti.

Selain penyelesaian kasus masyarakat ditingkat Kelurahan, personil yang ditugaskan dalam program ini juga berkewajiban memberikan pembinaan-pembinaan pada masyarakat setempat. Pembinaan bisa dilakukan ditingkat Kelurahan melalui FKPM (Forum Komunikasi Perpolisian Masyarakat) ataupun pembinaan ditingkat sekolah-sekolah yang berada di daerah tersebut.

Bentuk pembinaan di tingkat Kelurahan biasanya berupa penyampaian informasi terbaru mengenai produk-produk hukum tindak pidana ringan (Tipiring) dan diskusi yang berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan dengan adanya pembinaan dan diskusi ini adalah agar tercipta suatu hubungan antara masyarakat dengan Polri dan Polri menjembatani hubungan diantara keduanya. Karena hubungan ini diibaratkan sebagaimana simbiosis mutualisme yang saling memberi manfaat, mereka berinteraksi satu dengan yang lain serta saling membutuhkan. Oleh karena itu, hubungan masyarakat dan Polri praktis seyogyanya dibina dengan tujuan agar tercapai kesuksesan dalam hal kinerja Polri ditengah masyarakat.

Kedua hubungan ini begitu penting mengingat bahwa hubungan tersebut akan menentukan citra polisi dimata masyarakat. Coffrey *et.al.*, menyatakan bahwa semakin erat hubungan persahabatan antara Polri dengan masyarakat, maka semakin positif citra polisi. Sebaliknya kian renggang hubungan keduanya akan semakin negatif-lah citra polisi di mata masyarakat. (Rastra, Edisi Maret, 2011:29).

Sedangkan bentuk pembinaan yang lain, yang tidak kalah penting adalah pembinaan di sekolah-sekolah. Khususnya pada anak-anak TK (Taman Kanak-kanak). Para personil melakukan pembinaan melalui program PSA (Polisi Sahabat Anak) yang bekerjasama dengan satuan Lantas Polresta Surakarta. Ipda Sutarno mengungkapkan :

Kalau disini, ada Polisi Sahabat Anak, yaitu tugasnya pergi ke TK-TK yang ada di Kota Surakarta. Tujuan dari PSA itu, *supaya* polisi itu nggak ditakuti oleh anak-anak. *Kan* ada juga orang tua yang *ngasih tau* anaknya dengan *nakut-nakuti* kalau nakal *ditangkep* pak polisi. Nah itu *nggak bener*, jadinya nanti kalau anak itu *udah gede* bisa takut *beneran* dengan polisi. Nah, caranya supaya nggak takut sama polisi, ya kita *kasih tahu*, dibimbing, kadang-kadang diajak main ke Polresta sini, kan seneng mereka, jadi *gitu* caranya supaya anak-anak sejak kecil nggak takut *ama* polisi.³

Bahasa persuasi yang disampaikan saat pembinaan oleh PSA pada anak-anak TK ini dilakukan melalui kegiatan bercerita/mendongeng. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya bentuk kreatifitas dari personil supaya pesan yang disampaikan dapat dimengerti oleh anak-anak TK tersebut. Salah satu daya untuk melakukan persuasi biasanya diwujudkan melalui teknik komunikasi berupa kecakapan untuk menentukan jenis pendekatan apa yang pas, misalnya mengenali karakteristik orang yang dihadapi. (Kristina, 2006:2). Dengan demikian, anak-anak mengenal peran polisi dengan baik tanpa rasa takut. Tujuannya agar anak-anak TK dapat juga mengenal rambu-rambu lalu lintas sejak dini. Hal ini diungkapkan oleh Ipda Sutarno :

Bentuk pembinaan pada anak-anak TK disini adalah dengan mendongeng, sehingga masing-masing anggota PSA harus memiliki kreatifitas masing-masing untuk dapat menyampaikan pesan mengenai rambu-rambu lalu lintas dengan baik dan dapat dipahami *murid-murid TK itu*. Dengan adanya pengenalan rambu-rambu lalu lintas dan memperkenalkan sosok polisi semenjak dini, diharapkan sosok polisi di pikiran mereka bukan lagi sosok yang menakutkan.⁴

³ dan ⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK), 18 Januari 2012.

Pada tingkat SMP dan SMA siswa juga diberikan pembinaan. Berbeda dengan pendekatan persuasi yang dilakukan pada anak-anak TK, PSA melakukan pendekatan pada siswa-siswi SMP dan SMA ini melalui pelatihan tentang PKS (Patroli Keamanan Sekolah), kemudian mempercayakan mereka untuk mengatur kelancaran lalu lintas di area sekolah mereka di waktu-waktu tertentu, yaitu di saat siswa pergi ke sekolah maupun disaat siswa pulang sekolah. Pelatihan PKS ini sekaligus dapat menjadi pengetahuan dasar mereka mengenai sosok polisi dan ketaatan terhadap program lalu lintas yang ada. (Hasil wawancara dengan Ka Unit SPK Polresta Surakarta).

Kesimpulan

Langkah Polresta Surakarta dalam menggunakan strategi pencitraan melalui program 'Satu Polri Satu Desa' merupakan langkah yang cerdas. Di dalam program tersebut konsep *silaturrahim* mendapatkan porsi utama sebagai strategi pendekatan Polri terhadap masyarakat. Konsep tersebut dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Kota Surakarta dikarenakan konsep *silaturrahim* merupakan konsep yang dekat dengan keseharian dan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat.

Pada konteks masyarakat Jawa pada khususnya, penerapan praktek-praktek *silaturrahim* hampir tidak mendapat tentangan yang berarti karena sejalan dengan nilai kearifan lokal yang telah ada sebelumnya yaitu *sambang, sambung, sawung*. Kesuksesan program ini lantas amat tergantung pada kesungguhan dan totalitas personil Polri dalam melakukan pendekatan-pendekatan sosial terhadap masyarakat.

Saran

Mengingat pengguna jasa kepolisian adalah seluruh lapisan masyarakat, maka sekiranya jika para personil Polresta Surakarta dalam menjalankan tugasnya kurang profesional, yang dirugikan adalah seluruh masyarakat. Karena mengalami kerugian secara langsung, sudah barang tentu kepercayaan publik kepada personil

Polresta Surakarta yang kurang profesional itu akan merosot. Sebaliknya, semakin profesional, masyarakat akan kian menikmati situasi aman tertib, adil, dan merasa dilindungi serta diayomi. Tegasnya, bahwa polisi yang profesional adalah polisi yang mampu menegakkan hukum secara tegas dan humanis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Effendy, Onong Uchjana. 2002. *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Geertz, Clifford, 1960, *The Religion of Java*, Chicago dan London: The University of Chicago Press.
- Kristina, Dyah. 2006. *Bahasa Persuasif dalam Public Relations*. UNS-PRESS.
- Kriyantono, Rachmat. 2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Oliver, Sandra. 2007. *Strategi Public Relations*. PT. Gelora Aksara Pratama.
- Pawito. 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LkiS.
- Schroder, Peter. 2008. *Strategi Politik (Edisi Revisi untuk Pemilu 2009)*. Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung.
- Serikit, Poudra Swasty Ratu Maharani. 2009. *Pola Komunikasi Masyarakat Osing*. Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Sutopo, H.B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Turner, Lynn H & Richard West. 2008. *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi Edisi 3*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Zoetmulder, P.J. bekerja sama dengan S.O. Robson, 2006, *Kamus Jawa Kuna Indonesia*, terjemahan: Darusuprta Sumarti Suprayitna, Jakarta: Gramedia, cetakan ke-5.

Majalah:

Rastra. *Kemitraan dengan Media Penting, Perubahan Perilaku Anggota Juga Lebih Penting*. No. 121, Maret 2011.

Security. *Polri Wujudkan Membangun Dirinya Yang Sipil*. Edisi Khusus, Juli 2006.

Jurnal:

Marzawi. 2009. *Komunikasi dan Humas Ala Islam (Studi tentang Silaturahmi dalam Mendukung MBS)*. Jurnal *Innovatio*, Vol. VIII, No. 1.

Proceeding:

Suryadi, Edi dan Kusnendi. 2010. Kearifan Lokal dan Perilaku Edukatif, Ilmiah, Religius. *Proceeding of The 4th International Conference on Teacher Education*.